

# artikel elia

*by* Jaka Dernata

---

**Submission date:** 14-Jan-2024 07:27AM (UTC+0800)

**Submission ID:** 2270323805

**File name:** artikel\_elia\_plagiat.docx (35.4K)

**Word count:** 4709

**Character count:** 32255

## ANALISIS KEBIJAKAN PEMBERIAN INSENTIF GURU NGAJI PENDIDIKAN AL-QUR'AN (GURU NGAJI) DI KABUPATEN KAUR

Elia Gustiani<sup>1</sup>, Henny Aprianty<sup>2</sup>, Rahiman Dani<sup>3</sup>  
 Magister Administrasi Publik  
 Universitas Prof. Dr. Hazairin SH Bengkulu

### ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan kebijakan pemberian insentif yang diberikan kepada guru ngaji dalam mendidik dan mengajar para siswa-siswi/pemuda-pemudi dan peran pemerintah daerah dalam memberikan perhatian kepada guru ngaji. Penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian deskriptif kualitatif melalui studi kasus. Data penelitian ini merupakan data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data meliputi metode observasi, wawancara, dan dokumenter. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan pengambilan keputusan/validasi. Temuan penelitian ini adalah sebagai berikut: Kebijakan pengembangan Guru Al-Quran di Kabupaten Kaur telah dikelola dengan baik dan akuntabel, yang tercermin dari indikator pemantauan yang meliputi: 1) Prosedur dan tujuan serta sasaran kebijakan/praktik, 2) sumber daya, 3) karakteristik lembaga pelaksana, 4) komunikasi dan kegiatan pelaksanaan antar instansi terkait, 5) sikap atau sikap pelatih, 6) lingkungan sosial, ekonomi, dan politik.

**Kata kunci:** Kebijakan, Inisiatif, Guru Ngaji.

29

### ABSTRACT

*This research was conducted with the aim of describing the policy of providing incentives given to Koran teachers in educating and teaching students/youth and the role of local governments in providing attention to Koran teachers. The research used in this paper is qualitative descriptive research through case studies. This research data is primary data and secondary data. Data collection methods include observation, interviews and documentary methods. Data analysis techniques include data reduction, data presentation, and decision making/validation. The findings of this research are as follows: The Al-Quran Teacher development policy in Kaur Regency has been managed well and accountably, which is reflected in monitoring indicators which include: 1) Procedures and objectives and targets of policy/practice, 2) resources, 3) characteristics of implementing agencies, 4) communication and implementation activities between related agencies, 5) attitudes or attitudes of trainers, 6) social, economic and political environment.*

**Keywords:** Policy, Initiative, Koran Teacher.

## PENDAHULUAN

Tujuan pendidikan nasional diatur dalam undang-undang 1945 adalah untuk mempelajari kehidupan nasional dan membangun seluruh rakyat Indonesia, yaitu orang-orang yang beriman dan taat kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berilmu, dan keterampilan. Kesehatan fisik dan mental, stabilitas dan kemandirian individu, tanggung jawab sosial dan nasional.

Tujuan utama pendidikan adalah membentuk akhlak seseorang agar dapat menjalani kehidupan dengan baik serta Mengembangkan keimanan dan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Namun kenyataannya pendidikan hanya menghargai orang-orang yang cerdas, salah satu contohnya adalah Ujian Nasional (UN) yang merupakan salah satu indikator keberhasilan akademik, apapun cara pembentukan karakter dan nilai-nilai anak, salah satunya, yaitu kemampuan untuk belajar, membaca dan menulis dalam bahasa Inggris. Qur'an.

Pada masa sekarang ini masih ada siswa-siswi dan pemuda-pemudi yang sudah berprestasi di sekolah belum mempunyai kemampuan dalam Al-Quran ditulis untuknya (melek Al-Qur'an), apalagi untuk mengamalkan isi kandungannya. Hal ini ditandai dengan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ), baik daerah, provinsi maupun nasional. Berkaitan dengan ini, jika dilihat dari perkembangan yang ada, kemampuan baca dan tulis Al-Qur'an belum sepenuhnya dimiliki oleh masyarakat, ini dapat dilihat dari kualitas bacaan Al-Qur'an sebagian dari para imam shalat, khatib shalat Jum'at, dan penceramah, dan masih sulit didapatkan qori-qori'ah yang berkualitas dan berstandar LPTQ (lembaga pengembangantilawatil qur'an) Nasional, menurut Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kaur.

Dibandingkan dengan Provinsi Bengkulu (menurut Kepala Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2022) yang hanya bisa sampai di urutan ke 10 yaitu mendapat dua medali emas, Provinsi Sumatera Barat sudah jelas lebih baik dalam mengutus dan mengikutsertakan para kontingen dan kafilahnya untuk berkompetisi di ajang dua tahunan itu itu dikarenakan peserta/kafilah dari

Provinsi Bengkulu belum bisa bersaing dalam ajang MTQ yang dilaksanakan dua tahun sekali.

Dalam pelaksanaannya MTQ tingkat kabupaten yang dilakukan, selain untuk mengetahui tingkat melek Al-Qur'an juga untuk menyeleksi kafilah peserta MTQ kabupaten, dan hasil dari MTQ Provinsi inilah yang akan mewakili daerah atau provinsi masing-masing untuk berkompetisi di MTQ tingkat nasional.

Seperti disebutkan sebelumnya, yaitu.. lebih penting bukan hanya sekedar memahami dan mengerti akan isi dan kandungan Al-Qur'an bagi para qori-qoriah, mufassir-mufassirah, hafidz-hafidzah, fahmil, syarhil dan khottot-khottot Qur'an serta menulis kandungan Al-Qur'an (M2KQ), namun lebih jauh dari itu, hendaknya mereka jadi panutan bagi masyarakat agar mereka memiliki model yang akan ditiru Dalam hidupnya oleh karena itu ini penting. mereka (qori-qoriah, mufassir-mufassirah, hafidz-hafidzah, fahmil, syarhil dan khottot-khottot Qur'an serta menulis kandungan Al-Qur'an) untuk menjadi model penerapan kandungan Al-Qur'an.

Tentunya tidak berlebihan jika mereka (qori-qoriah, mufassir-mufassirah, hafidz-hafidzah, fahmil, syarhil dan khottot-khottot Qur'an serta menulis kandungan Al-Qur'an) menjadi sangat penting mengingat bahwa masyarakat sekarang ini membutuhkan figur-figur yang baik untuk dicontoh. Kalangan birokrat, para profesional, pelaku usaha, pekerja lepas dan masyarakat umumnya perlu diberikan konsep-konsep pengembangan diri yang baik dan Qur'ani.

Berangkat dari kondisi tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur selaku lembaga pemerintahan telah berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam MTQ dan mewujudkan masyarakat yang gemar Membaca, menulis dan mengamalkan Al-Quran. yang ada di dalamnya, yaitu dengan memberikan insentif kepada guru ngaji dalam wilayah Kabupaten Kaur, yang tertuang didalam Keputusan Bupati Kaur Nomor 02 Tahun 2011 Petunjuk pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Al-Qur'an dan Pengurus Masjid Penerima Insentif Daerah di Kabupaten Kaur, Insentif ini diharapkan menjadi pemicu dan perangsang para guru ngaji untuk lebih bekerja keras secara bersama-sama dalam mewujudkan masyarakat yang cinta dan

mengamalkan isi Al-Qur'an, dengan cara melakukan pendidikan sedini mungkin kepada siswa-siswi/pemuda-pemudi, dan anak-anak.

Pemberian insentif ini dianggap cara yang tepat untuk memotivasi para guru ngaji, sebab dengan diberikannya insentif diharapkan dapat memicu kinerja guru ngaji untuk lebih optimal. Proses insentif yang Ketentuan Ini adalah bentuk pembayaran lain yang bukan pembayaran langsung, suatu sistem yang dikenal sebagai sistem pembayaran tetap pembayaran kinerja. Insentif ini diberikan sebagai alat motivasi untuk mendorong guru mengaji agar bekerja dengan kemampuan terbaiknya. Insentif inilah salah satu wujud kepedulian pemerintah terhadap penerapan nilai-nilai agama di dalam masyarakat.

Pemberian insentif kepada guru Alquran merupakan insentif yang dapat memotivasi dan mendorong mereka untuk bekerja lebih efektif. Insentif erat kaitannya dengan kinerja (dalam hal ini guru mengaji). Terdapat umpan balik dua arah antara insentif dan kinerja. Kinerja yang baik dihargai dengan insentif dan tujuannya adalah untuk lebih meningkatkan kinerja di masa depan.

Insentif yang diberikan kepada guru ngaji diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah meningkatkan keterampilan membaca dan menulis Al-Quran dan meningkatkan akhlak khususnya kepada para siswa-siswi dan pemuda-pemudi selaku generasi muda.

Namun kenyataannya dalam pelaksanaan MTQ Kabupaten Kaur yang dilaksanakan pada tahun 2022 lalu, banyak Desa bahkan ada Kecamatan yang tidak sama sekali mengirimkan peserta/kafilah. Padahal untuk menunjang pelaksanaan acara dua tahunan ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur telah mengeluarkan dana yang cukup besar yaitu sekitar 864 juta rupiah selama setahun. Dana tersebut khusus diberikan kepada 56 guru ngaji di 15 kecamatan se-Kabupaten Kaur pada tahun 2022. Namun dengan jumlah dana tersebut, partisipasi dan kontribusi yang diharapkan dari guru ngaji dengan menghasilkan anak-anak yang dapat berpartisipasi di ajang MTQ baik kabupaten, provinsi dan nasional belum sesuai dengan harapan Pemerintah Daerah.

Tabel 1.4 Rekapitulasi Guru Ngaji di Kabupaten Kaur Kurun Waktu 3 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Jumlah Guru Ngaji	Persentase (%)
1	2020	235 Orang	7,83 %
2	2021	266 Orang	8,87 %
3	2022	56 Orang	1,68 %

Sumber : Peraturan Bupati Kabupaten Kaur 2022

Penelitian tentang Analisis Kebijakan Pemberian Insentif Guru Ngaji belum pernah ada, namun penelitian cukup banyak yang telah dilakukan berkaitan dengan analisis, diantaranya adalah penelitian Lopes (2011) "Analisis Kinerja Aparatur Daerah Dalam Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan Kendahen Kabupaten Sangihe Provinsi Sulawesi Utara"; tidak dieksekusi dengan baik.

Penelitian ini menggunakan delapan indikator menurut Warella (1997 : 31) tentang pelayanan yang berkualitas meliputi kesederhanaan, kejelasan, kepastian, keamanan, transparansi, efisiensi pelayanan, keekonomian, keadilan dan ketepatan waktu pemberian pelayanan. Berdasarkan delapan indikator tersebut, hasil wawancara informan belum dapat tergolong baik.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Hastuti (2014) dengan judul "Analisis Kerja Media Center Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Bengkulu". Penelitian ini mengukur tingkat pelaksanaan pengelolaan, pencapaian target, informasi yang dilakukan sudah berjalan dengan baik dan kelengkapan sarana sudah cukup baik. Namun dalam hal kemampuan sosialisasi dan komunikasi kepada masyarakat dan organisasi kurang baik dan belum optimal.

Rumusan pertanyaan penelitian untuk masalah di atas adalah sebagai berikut: Bagaimana kebijakan motivasi mengaji pada guru mengaji di Kabupaten Kaur?

Tujuan kajian ini adalah untuk menerangkan peruntukan dasar insentif yang diberikan kepada guru ngaji dalam mendidik dan mengajar para siswa-siswi/pemuda-pemudi dan peran pemerintah daerah dalam memberikan perhatian kepada guru ngaji.

34

## METODE PENELITIAN

Jenis studi yang digunakan dalam studi ini ialah penelitian deskriptif kualitatif melalui kajian kasus. Penyelidikan yang menggunakan kaedah deskriptif ialah penyelidikan yang berupaya menjelaskan mengapa sesuatu terjadi atau menjawab pertanyaan “mengapa”. (Jonathan Sarwono, 2006) menurut kualitatif penelitian adalah suatu proses, cerdas, kompleks, interaktif dengan manusia. Di sisi lain, penelitian studi kasus kualitatif berfokus pada topik tertentu dan menetapkan sebagai sebuah contoh. Data studi kasus dapat diperoleh dari seluruh pemangku kepentingan. Dengan kata lain, penelitian ini dikumpulkan dari berbagai sumber.. (Hadari Nawawi, 1991).

(Sugiyono, 2016) Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan prinsip post-positivisme, yaitu studi tentang hakikat sesuatu yang alami, bukan eksperimen, penelitilah alat utama, kumpulan data teknologinya diekspor. Triangulasi (integrasi), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan temuan penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Dalam studi ini kesimpulannya tidak terlalu jauh dari informasi yang ada, melainkan hanya fakta yang dikumpulkan dan dijelaskan sesuai dengan variabel yang diteliti secara cermat dan menyeluruh.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Oleh karena itu, alat utama pengumpulan data dalam penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain. Menurut (Sugiyono, 2016), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang mempelajari hakikat suatu hal (bukan eksperimen), peneliti sebagai alat utama, dan metode yang dilakukan mengumpulkan data melalui triangulasi (kombinasi). Metode penelitian kualitatif dalam analisis data lebih bermakna dibandingkan generalisasi.

Dalam kajian ini, penulis menggunakan gaya kajian kualitatif, mengetahui sejauh mana kebijakan pemberian insentif yang diberikan kepada guru ngaji dalam mendidik dan mengajar para siswa-siswi/pemuda- pemudi dan peran pemerintah daerah dalam mengawasi dan memberikan perhatian kepada guru ngaji di Kabupaten Kaur.

35

Penelitian ini bersifat cross-sectional karena hanya dilakukan satu kali saja. Survei ini hanya akan digunakan dalam waktu terbatas dan akan digunakan untuk survei lainnya berbeda tidak digunakan sebagai pembandingan.

Untuk melengkapi data dan kajian yang diperlukan, penulis menggunakan cara pengumpulan data berikut:

1. Kuesioner Berisi tanya jawab langsung mengenai permasalahan yang berkaitan dengan permasalahan yang dipelajari dalam kelompok.
2. Observasi Merupakan proses dimana peserta turun langsung ke tempat untuk mengamati, melaksanakan dan mengawasi kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi.
3. Dokumen, yaitu proses pengumpulan data dengan mencantumkan dokumen yang diterima dari organisasi..

Maka yang menjadi informan dalam penelitian tesis ini ada 5 orang, 5 orang narasumber tersebut terdiri dari: Kepala Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Kaur, 1 orang tim anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur, 1 orang Kepala Kementerian Agama Kabupaten Kaur, 1 orang guru ngaji dan 1 orang masyarakat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Berdasarkan analisis dan hasil penelitian berdasarkan pertimbangan teoritis kebijakan pemberian insentif guru ngaji pendidikan al-quran (guru ngaji) di Kabupaten Kaur, Jadi kita dapat menyimpulkan: dasar pemberian insentif guru ngaji pendidikan al-quran (guru ngaji) di Kabupaten Kaur dikelola dengan baik berdasarkan indikator pemantauan, termasuk 1) standar dan tujuan politik, kebijakan dan sasaran, 2) sumber daya, 3) karakteristik lembaga yang berpartisipasi, dan 4) komunikasi dan implementasi antar departemen terkait tindakan. Kegiatan, 5) keinginan atau sikap penyelenggara, 6) lingkungan sosial, ekonomi, politik.

### Pembahasan

Berdasarkan data hasil wawancara dengan narasumber, diskusi ini akan menjelaskan

kembali data yang telah dikumpulkan sebelumnya mengenai konsep-konsep yang relevan dengan pembahasan..

### **Kebijakan Insentif Guru Ngaji di Kabupaten Kaur**

Guru mengaji atau disebut juga ustaz atau ustazah mempunyai peranan penting dalam membentuk karakter dan moral generasi muda Indonesia. “Mereka tidak mengajarkan ilmu agama tetapi mengajarkan kepada siswa nilai-nilai kebaikan, ketakwaan, dan toleransi,” ujarnya. Namun, guru bahasa Korea seringkali tidak menerima cukup uang dan pengakuan. Hal ini terlihat dari masyarakat yang menghadapi kendala ekonomi dan kurangnya akses terhadap manfaat sosial dan keamanan finansial.

“Program insentif ini bertujuan untuk memperbaiki keadaan ini dan mendorong para guru mengaji untuk tetap teguh pada tujuan mulia,” ujarnya. Ia menambahkan, Untuk itu, PPP DPR RI berterima kasih kepada Kementerian Agama India yang telah menyediakan dana tersebut sebesar Rp324 miliar kepada 216.461 guru di seluruh India. Dana tersebut akan disalurkan sebagai insentif bagi guru PNS di RA dan Madrasah pada tahun 2023. Namun pemerintah belum terlalu memperhatikan insentif bagi guru mengaji, menurut Awiek. Untuk itu, ia meminta agar kebijakan pemerintah yang banyak menyalurkan APBD untuk insentif guru bahasa Korea diperbaiki di tingkat nasional melalui APBN.

Meter dan Horn menyajikan model dasar dengan enam variabel yang membentuk hubungan antara kebijakan dan kinerja. Dalam model ini, variabel terikatnya adalah kinerja, yang didefinisikan sebagai sejauh mana standar dan tujuan kebijakan terpenuhi. Variabel yang menghubungkan kebijakan dan tindakan adalah sebagai berikut. 1) Standar dan tujuan 2) Sumber daya (keuangan) 3) Karakteristik organisasi 4) Kegiatan komunikasi dan penguatan (komunikasi dan tindakan) 5) Sikap fasilitator (kepribadian pelatih) 6) Kondisi ekonomi, sosial dan politik (ekonomi, sosial dan kebijakan). Kondisi politik Selain hubungannya dengan kondisi sosial dan politik (sosial dan politik) dan kondisi politik).

Model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn disebut dengan Model Implementasi Kebijakan. Proses promosi ini merupakan proses abstrak

implementasi politik yang dilakukan untuk mencapai efektivitas politik yang tinggi dikaitkan dengan berbagai variabel. Variabel implementasi kebijakan publik pada model Van Meter dan Van Horn (1975) dijelaskan sebagai berikut:

#### **1) Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan.**

Implementasi kebijakan diukur dari keberhasilannya dan tindakan serta tujuan kebijakan yang paling tepat secara sosial. budaya berada pada tingkat implementasi kebijakan. Jika ukuran dan targetnya terlalu bagus (utopis), implementasi kebijakan Menurut Van Meter dan Van Horn, akan sulit untuk mengukur efektivitas implementasi kebijakan dengan menggunakan standar dan tujuan tertentu yang harus dipenuhi. mengevaluasi tingkat pencapaian standar dan tujuan tersebut. Memahami standar dan tujuan yang terkait dengan tujuan politik adalah hal yang penting. Jika pelaksana kebijakan (pejabat publik) tidak mengetahui standar dan tujuannya, implementasi kebijakan sering kali (sayangnya) gagal kebijakan. Norma dan tujuan politik Hal ini erat kaitannya dengan sikap terhadap para ahli. Sikap (kepentingan) pendukung terhadap norma dan tujuan politik juga penting. Kebijakan bisa gagal karena mereka tidak tahu apa tujuannya kebijakan.

Berhubungan dengan penjelasan diatas maka untuk mengetahui sikap para pelaksana kebijakan dalam standard Tujuan Kebijakan/Praktik tujuan bantuan keuangan kepada pemberian insentif guru ngaji pendidikan al-quran (guru ngaji) di Kabupaten Kaur, maka peneliti mengajukan pertanyaan kepada para saya mendengar mu Dari jawaban pembicara, kita dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: sikap para pelaksana kebijakan dalam standard dan sasaran dasar/ukuran dan tujuan bantuan keuangan kepada pemberian insentif guru ngaji sudah dilaksanakan dengan cukup baik. Maka hal ini perlu adanya usulan penaikan gaji guru mengaji hal ini bertujuan untuk menambah dan meningkatkan kinerja guru ngaji dalam membimbing siswanya atau muridnya dalam pelaksanaan mengajar.

Selanjutnya sangat penting untuk mengetahui arah sikap para pelaksana terhadap norma dan tujuan dasar bantuan keuangan kepada pemberian insentif guru ngaji pendidikan al-quran (guru ngaji) di Kabupaten Kaur, maka Penyidik bertanya kepada pelapor. Berdasarkan jawaban para informan dapat disimpulkan bahwa sikap pelaksana kebijakan adalah terhadap norma dan tujuan dasar bantuan keuangan kepada pemberian insentif guru ngaji sudah dilaksanakan cara cukup bagus. Kebijakan untuk guru ngaji sangat terbantu setelah ada kebijakan dari pemerintah, karena kebijakan pemerintah tersebut mendukung kegiatan guru ngaji tersebut.

## 2) Sumber daya.

Setiap tingkat implementasi memerlukan sumber daya manusia yang signifikan. Kebijakan politik menentukan kualitas dan kinerja. Masyarakat sebagai sumber daya mempunyai peranan penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi kebijakan bergantung pada kemampuan penggunaan sumber daya yang ada, khususnya sumber daya manusia. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu merupakan parameter penting bagi keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya politik penting untuk komunikasi. Selain itu, sumber daya Māori harus tersedia untuk memfasilitasi proses implementasi Māori. Sumber-sumber ini adalah finansial atau insentif lainnya untuk mendorong implementasi (implementasi) kebijakan. Tidak adanya atau terbatasnya insentif finansial atau lainnya untuk implementasi kebijakan merupakan salah satu alasan utama kegagalan implementasi kebijakan.

Sehubungan dengan materi diatas sangat penting untuk mengetahui bagaimana menurut staf dari pemerintah daerah, pemberian insentif guru ngaji pendidikan al-quran (guru ngaji) dan dinas terkait dalam merespon, menanggapi kebijakan tersebut, maka peneliti mengajukan pertanyaan kepada para seorang informan Berdasarkan hasil wawancara. dengan para informan dapat

disimpulkan bahwa para staf dari pemerintah daerah menilai pemberian inisiatif untuk guru ngaji sudah sepatutnya dilakukan pemerintah setempat, karena untuk sedikit meringankan beban para guru ngaji dan mengapresiasi apa yang mereka lakukan.

Selanjutnya untuk mengetahui bagaimana anggaran dan waktu melaksanakan kebijakan tersebut dari pemerintah daerah ke pemberian insentif guru ngaji pendidikan al-quran (guru ngaji) dan dinas terkait, kemudian pengkaji bertanya soaln kepada informan. Berdasarkan jawaban daripada informan, dapat disimpulkan bahwa mengenai anggaran dan waktu melaksanakan kebijakan tersebut dari pemerintah daerah ke pemberian insentif guru ngaji pendidikan al-quran (guru ngaji) dan dinas terkait sudah berjalan dengan baik. Serta hasil dari kebijakan beberapa dana insentif ke dewan guru ngaji sangat-sangat terbantu.

Kemudian sangat penting juga untuk mengetahui bagaimana sumberdaya kebijakan berupa dana atau intensif lainnya yang digunakan dalam melaksanakan kebijakan dari pemerintah daerah ke pemberian insentif guru ngaji pendidikan al-quran (guru ngaji) dan dinas terkait, kemudian peneliti bertanya kepada informan. Berdasarkan tanggapan para informan, sumber daya kebijakan diyakini mencakup hibah atau insentif lain untuk melaksanakan kebijakan pemerintah daerah ke pemberian insentif guru ngaji sudah merupakan tindakan yang tepat. Kemudian perlu diperhatikan bahwa guru ngaji harus sesuai dengan banyaknya murid yang belajar mengaji dalam kelompok tersebut.

## 3) Karakteristik organisasi pelaksana.

Fokusnya adalah pada pejabat pelaksana, yaitu organisasi formal dan informal yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Hal ini penting karena implementasi kebijakan seringkali dipengaruhi oleh faktor-faktor yang paling relevan dan relevan bagi pengambil kebijakan. Hal ini relevan dengan konteks politik di mana banyak kebijakan

diterapkan dan implementasinya diperlukan. Konteks lain memerlukan aktor yang demokratis dan persuasif. Juga, ruang lingkup dan lokasi juga penting dalam menentukan siapa yang akan menegakkan kebijakan tersebut. Ada dua aspek pengelolaan organisasi, dalam hal ini aspek utama struktur kantor: Standar Operasional Prosedur (SOP) dan divisi (Edward III, 1980)..

a) Standard Operating Procedures (SOP).

SOP dikembangkan sebagai respons internal terhadap kebutuhan untuk secara konsisten mengelola organisasi yang kompleks dan luas, serta keterbatasan waktu dan sumber daya dalam implementasinya. SOP ini dirancang untuk mencegah perubahan kebijakan karena prosedur sebelumnya tidak lagi sesuai dengan situasi dan tujuan baru. SOP menghalangi penerapan kebijakan baru yang memerlukan prosedur baru dalam melakukan sesuatu atau tipe orang baru untuk melaksanakannya. Semakin banyak kebijakan mengubah operasional organisasi sehari-hari, semakin sulit penerapan SOP.

Maka untuk mengetahui apakah terdapat Standard Operating Procedures (SOP) untuk melaksanakan/menjalankan kebijakan dari pemerintah daerah, pemberian insentif guru ngaji pendidikan al-quran (guru ngaji) dan dinas terkait, Kemudian penyidik bertanya kepada pelapor. Wawancara dengan informan menunjukkan bahwa standar operasional prosedur (SOP) sudah ada diterapkan kebijakan dari pemerintah daerah, pemberian insentif guru ngaji saya rasa sudah diterapkan dengan sangat baik dan terorganisir. Biasanya setiap guru ngaji mempunyai dan menerapkan SOP dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar mengaji supaya sesuai dengan standard yang ada.

b) Fragmentasi.

Banyak tekanan yang muncul dari luar birokrasi, termasuk kelompok kepentingan, lembaga, komposisi komite legislatif, pemerintah, dan sifat kebijakan yang mempengaruhi birokrasi. Desentralisasi adalah pembagian tanggung jawab suatu wilayah politik antara beberapa badan pemerintahan. "Desentralisasi adalah pembagian tanggung jawab di bidang politik menjadi beberapa unit administratif."

Semakin banyak aktor dan lembaga yang terlibat dalam suatu kebijakan, dan semakin saling terkait pengambilan keputusan, maka semakin kurang efektif implementasi kebijakan tersebut. Edward menambahkan, semakin banyak perubahan yang diperlukan untuk menerapkan kebijakan, semakin kecil kemungkinan kebijakan tersebut berhasil.

#### 4) Komunikasi antar organisasi

Menurut Van Meter dan Van Horn, untuk melaksanakan kebijakan publik secara efektif, individu (pengguna) perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan undang-undang. Standar dan tujuan harus dibagikan kepada siswa karena mereka bertanggung jawab untuk mencapainya. Berkomunikasi dalam kerangka yang menyampaikan informasi dari berbagai sumber kepada pengambil kebijakan tentang standar dan tujuan secara koheren dan konsisten (konsistensi dan konsistensi). Jika standar dan tujuan kebijakan tidak jelas, koheren, dan konsisten, pencapaiannya akan sulit. Kejelasan ini memungkinkan pembuat kebijakan mengetahui apa yang diharapkan dari mereka dan apa yang harus dilakukan. Komunikasi di lembaga publik merupakan tugas yang kompleks dan sulit. Proses mengkomunikasikan informasi dalam suatu permasalahan yang dapat menimbulkan masalah, baik disengaja maupun tidak, bagi organisasi, dari satu organisasi ke organisasi lainnya atau bagi informasi lainnya. Ketika sumber informasi dan tujuan berbeda, sedangkan sumber informasi yang sama memberikan penjelasan, pembuat kebijakan terkadang tersesat dan tugas menjadi lebih sulit. Oleh karena itu, prospek penerapan kebijakan yang efektif sangat bergantung pada keadilan dan ketidakberpihakan para pembuat kebijakan. Koordinasi juga merupakan sarana yang ampuh dalam implementasi kebijakan. Semakin baik koordinasi informasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, maka akan semakin sedikit kesalahan yang terjadi, begitu pula sebaliknya...

Sehubungan dengan materi diatas maka sangat penting untuk mengetahui bagaimana konsisten sikap pemerintah daerah, pemberian insentif guru ngaji pendidikan al-quran (guru ngaji) dan dinas terkait mengenai pelaksanaan kebijakan tersebut, kemudian

pengkaji bertanya soal kepada informan. Berdasarkan jawaban daripada informan, disimpulkan bahawa konsisten sikap pemerintah daerah dan diknas terkait mengenai pemberian insiatif untuk para guru ngaji itu sudah cukup baik dan konsisten. Pemberian inisiatif tersebut seharusnya cukup sesuai dan sepadan dengan napa yang para guru ngaji kerjakan.

Selanjutnya untuk mengetahui bagaimana keseragaman sikap pemerintah daerah, pemberian insentif guru ngaji pendidikan al-quran (guru ngaji) dan dinas terkait mengenai pelaksanaan kebijakan tersebut, kemudian pengkaji bertanya soal kepada informan. Berdasarkan jawaban daripada informan, disimpulkan bahawa mengenai keseragaman sikap pemerintah daerah dan diknas terkait tentang pemberian inisiatif untuk para guru ngaji tersebut sudah cukup baik dan mereka mendukung dengan penuh kebijakan tersebut.

Berhubungan dengan penjelasan diatas maka sangat penting juga untuk mengetahui bagaimana kejelasan sikap pemerintah daerah, pemberian insentif guru ngaji pendidikan al-quran (guru ngaji) dan dinas terkait mengenai pelaksanaan kebijakan tersebut, Kemudian penyidik bertanya kepada pelapor. Berdasarkan tanggapan pembicara, dapat diambil keputusan tentang kejelasan sikap pemerintah daerah dan diknas terkait tentang pemberian inisiatif untuk para guru ngaji tersebut sudah cukup baik dan sepakat. Dapat dikatakan bahwa sikap pemerintah daerah memberikan kebijakan yang sangat mempermudah kegiatan belajar mengajar mengaji.

Untuk mengetahui bagaimana koordinasi pemerintah daerah, pemberian insentif guru ngaji pendidikan al-quran (guru ngaji) dan dinas terkait mengenai pengetahuan personal yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan tersebut, Kemudian penyidik bertanya kepada pelapor. Dari jawaban pembicara, kita dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: mengenai koordinasi pemerintah daerah dan diknas terkait tentang pemberian inisiatif untuk para guru ngaji mengenai pengetahuan personal yang berhubungan dengan

pelaksanaan kebijakan sudah cukup mumpuni dan terkoordinasi dengan baik.

23

### 5) Disposisi atau sikap para pelaksana

Van Meter dan Van Horn menyatakan, "Sikap pendukung kebijakan terhadap penerimaan atau penolakan dapat mempunyai dampak yang signifikan terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik." Namun kebijakan publik terlalu banyak sehingga pihak yang mengambil keputusan tidak memahami dan tidak dapat menghubungkan dengan kebutuhan, keinginan dan permasalahan yang harus diatasi." Bagaimana kebijakan mempengaruhi kebutuhan mereka dalam organisasi dan kebutuhan mereka sendiri. Kebijakan dimulai pertama kali dengan analisis bahwa sponsor (manajer) mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut akan diterapkan.

Ada tiga jenis faktor respons yang berkaitan dengan kemampuan dan kemauan melaksanakan kebijakan: pertama, pengetahuan kebijakan (awareness), pengetahuan dan kedalaman (pemahaman dan adopsi). Kedua, orientasi respon dalam hal penerimaan, netralitas atau penolakan (accept, reject, reject) dan ketiga, peran agency dalam politik. Penting untuk memahami keseluruhan tujuan dan sasaran kebijakan dari peraturan tersebut. Sebab, sesukses apa pun implementasi kebijakan, bisa saja gagal (mengecewakan) jika pemimpin (pegawai negeri) tidak memahami sepenuhnya standar dan tujuan kebijakan tersebut.

2

Orientasi pelaksana terhadap standar dan tujuan kebijakan. Orientasi pelatih terhadap standar dan tujuan kebijakan adalah hal yang "penting." Implementasi kebijakan mungkin gagal karena penyelenggara menolak tujuan kebijakan. Di sisi lain, penerimaan yang luas dan mendalam terhadap standar dan tujuan kebijakan oleh para pelaksana kebijakan dapat memainkan peran penting dalam implementasi kebijakan. Terakhir, motivasi praktisi mempengaruhi implementasi (kinerja) kebijakan. Jika faktor-faktor ini lemah atau lemah, maka implementasi kebijakan bisa gagal.

Sehubungan dengan penjelasan diatas sangat penting untuk mengetahui bagaimana

sikap pemerintah daerah, pemberian insentif guru ngaji pendidikan al-quran (guru ngaji) dan dinas terkait mengenai pengetahuan personil yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan tersebut, kemudian pengkaji bertanya soalan kepada informan. Berdasarkan jawaban daripada informan, dapat disimpulkan bahwa mengenai sikap pemerintah daerah dan diknas terkait tentang pemberian inisiatif untuk para guru ngaji mengenai pengetahuan personil yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan sudah cukup baik dan tegas. Sikap personil sangat berhubungan dengan pelaksanaan dan juga sangat terpengaruhi hasil kebijakan tersebut.

Selanjutnya untuk mengetahui bagaimana pemahaman dan pendalaman pelaksanaan kebijakan dari pemerintah daerah, pemberian insentif guru ngaji pendidikan al-quran (guru ngaji) dan dinas terkait, kemudian pengkaji bertanya soalan kepada informan. Berdasarkan jawaban daripada informan, dapat disimpulkan bahwa pemahaman dan pendalaman pemerintah daerah dan diknas terkait tentang pemberian inisiatif untuk para guru ngaji mengenai pengetahuan personil yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan sudah cukup mendalam dan sudah direalisasikan secara langsung walaupun masih ada yang terhambat oleh satu dan lain hal.

Kemudian penting juga untuk mengetahui bagaimana sikap pelaksana dalam menerima, netral, atau menolak kebijakan dari pemerintah daerah, pemberian insentif guru ngaji pendidikan al-quran (guru ngaji) dan dinas terkait, kemudian pengkaji bertanya soalan kepada informan. Berdasarkan jawaban daripada informan, dapat disimpulkan bahwa sikap pelaksana dalam menerima, netral, atau menolak pemerintah daerah dan diknas terkait tentang pemberian inisiatif untuk para guru ngaji mengenai pengetahuan personil yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan sudah sangat mendukung dan menerima usulan-usulan terkait kebijakan tersebut.

Terakhir Dalam hal ini, sangat penting untuk mengetahui caranya intensitas sikap pelaksana terhadap kebijakan dari pemerintah daerah, pemberian insentif guru ngaji

pendidikan al-quran (guru ngaji) dan dinas terkait, kemudian peneliti bertanya kepada informan. Berdasarkan jawaban informan dapat disimpulkan bahwa. Mengenai intensitas sikap pelaksana pemerintah daerah dan diknas terkait tentang pemberian inisiatif untuk para guru ngaji mengenai pengetahuan personil yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan sudah cukup intens dan diperhatikan usulan-usulan yang diterima.

## 2) 6) Lingkungan sosial, ekonomi dan politik

Faktor terakhir yang perlu dipertimbangkan ketika mengevaluasi implementasi adalah sejauh mana lingkungan eksternal mempengaruhi keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak menguntungkan dapat menimbulkan masalah jika kebijakan tidak dilaksanakan. Oleh karena itu, langkah-langkah lingkungan eksternal harus didukung untuk menerapkan kebijakan ini.

Terkait dengan penjelasan tersebut, maka penting untuk memahami sikap pemerintah terhadap faktor lingkungan eksternal untuk membantu implementasi kebijakan tersebut, sehingga peneliti bertanya kepada informan. Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, dapat disimpulkan bahwa sikap pemerintah terhadap faktor eksternal lingkungan hidup yang mendukung dorongan kebijakan tersebut sangat positif dan tidak mengganggu politik dan perekonomian alam.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Melalui analisis berdasarkan pemikiran teoritis dan temuan penelitian analisis kebijakan insentif guru pengajar bahasa Korea (reader teacher) di Kabupaten Kaur dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Kebijakan pembinaan guru (pembaca Al-Qur'an) di Kabupaten Kaur sudah terlaksana dengan baik, terlihat dari indikator pemantauan: 1) Standar dan Sasaran/Ukuran dan Sasaran Kebijakan, 2) Sumber Daya, 3) Karakteristik Aparat Penegak Hukum, 4) Komunikasi Antar Instansi yang Berkompeten dengan Kegiatan Penegakan Hukum, 5) Karakteristik dan Sikap Calon, 6) Kebijakan sosial, ekonomi dan lingkungan.

## Saran

Daripada hasil kajian yang dijalankan berkenaan analisis kebijakan pemberian insentif guru ngaji pendidikan al-quran (guru ngaji) di Kabupaten Kaur, maka dapat diketahui bahwa kebijakan pemberian insentif guru ngaji pendidikan al-quran (guru ngaji) di Kabupaten Kaur Hal ini diterapkan dengan baik, namun kurang baik. Oleh karena itu, peneliti menawarkan saran untuk memastikan pekerjaan terbaik di masa depan.: Kebijakan pemberian insentif guru ngaji pendidikan al-quran (guru ngaji) di Kabupaten Kaur sudah Ia berjalan lancar, tetapi masih ada perkara yang perlu diberi perhatian etos kerja para anggota dan pemimpin, rasa tanggungjawab dan indiatif, serta rencana masa depan yang harus selalu diprioritaskan dalam menjalankan tugas.

## Daftar Pustaka

- Abdulkahar Badjuri. (2002). *Kebijakan Publik Konsep & Strategi*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Burhan Bungin. (2003). *Analisis Data Penelitian Kualitatif Pemahaman Filosofis Dan Metodologis Ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Dessler. (2009). *Manajemen sumber daya manusia*. PT Indeks.
- FATTAH, N. (2004). *Landasan manajemen pendidikan*. Remaja Rosda Karya.
- Hadari Nawawi. (1991). *Metode penelitian bidang sosial*. Gadjah Mada University Press.
- HASIBUAN. (2014). *MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA*. BUMI AKSARA.
- Heidjrachman Ranupandojo, & Husnan, S. (1994). *Manajemen personalia*. BPFE. <https://doi.org/10.24198/adbispreneur.v3i3.19205>.
- Hornby, A. S. (2009). *Oxford Advanced Learners Dictionary of Current English - 7/E*. Oxford University Press.
- James P. Spradley. (1991). *PARTICIPANT OBSERVATION*. Bumi Aksara.
- Jonathan Sarwono. (2006). *Metode penelitian kuantitatif & kualitatif*. Graha Ilmu.
- Lexy J.Moleong. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya
- Margono, S. (2005). *Metodologi penelitian pendidikan*. Rineka Cipta.
- Matthew B. Miles, A. M. H. (1992). *Analisis data kualitatif*. Penerbit Universitas Indonesia (UI -Press).
- Nasution. (1996). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Tarsito Bandung.
- Nazir. (2009). *Metode penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Riant Nugroho. (2009). *Public policy : teori kebijakan, analisis kebijakan, proses kebijakan, perumusan, implementasi, evaluasi, revisi, risk management dalam kebijakan publik*. Elex Media Komputindo.
- Sondang P. Siagian. (2002). *Manajemen sumber daya manusia*. Bumi aksara.
- Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2007). *Statistika untuk penelitian*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta. In *Bandung: Alfabeta*. (p. 118). Alfabeta.T.
- Hani Handoko. (2012). *Cover Image MANAJEMEN PERSONALIA DAN SUMBER DAYA MANUSIA*. BPFE-Yogyakarta. World Scientific

# artikel elia

---

## ORIGINALITY REPORT

---

18%

SIMILARITY INDEX

17%

INTERNET SOURCES

12%

PUBLICATIONS

10%

STUDENT PAPERS

---

## PRIMARY SOURCES

---

1	<a href="https://repositori.uma.ac.id">repositori.uma.ac.id</a> Internet Source	1%
2	<a href="https://repositori.unpas.ac.id">repositori.unpas.ac.id</a> Internet Source	1%
3	<a href="https://digilibadmin.unismuh.ac.id">digilibadmin.unismuh.ac.id</a> Internet Source	1%
4	Submitted to Universitas Musamus Merauke Student Paper	1%
5	<a href="https://repositori.unhas.ac.id">repositori.unhas.ac.id</a> Internet Source	1%
6	<a href="https://repositori.umj.ac.id">repositori.umj.ac.id</a> Internet Source	1%
7	Submitted to Universitas Terbuka Student Paper	1%
8	<a href="https://repositori.ut.ac.id">repositori.ut.ac.id</a> Internet Source	1%
9	<a href="https://repo.apmd.ac.id">repo.apmd.ac.id</a> Internet Source	<1%

---

10	<a href="http://docplayer.info">docplayer.info</a> Internet Source	<1 %
11	<a href="http://journals.unihaz.ac.id">journals.unihaz.ac.id</a> Internet Source	<1 %
12	<a href="http://seminar.uad.ac.id">seminar.uad.ac.id</a> Internet Source	<1 %
13	<a href="http://repositori.uin-alauddin.ac.id">repositori.uin-alauddin.ac.id</a> Internet Source	<1 %
14	<a href="http://www.scribd.com">www.scribd.com</a> Internet Source	<1 %
15	Submitted to Universitas Nasional Student Paper	<1 %
16	<a href="http://ejurnal.binawakya.or.id">ejurnal.binawakya.or.id</a> Internet Source	<1 %
17	<a href="http://id.123dok.com">id.123dok.com</a> Internet Source	<1 %
18	<a href="http://journal.ipm2kpe.or.id">journal.ipm2kpe.or.id</a> Internet Source	<1 %
19	Farichatun Nisa'. "MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR, PUTING BELIUNG, DAN TANAH LONGSOR DI KABUPATEN JOMBANG", JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik), 2014 Publication	<1 %

20	Submitted to Universitas Maritim Raja Ali Haji Student Paper	<1 %
21	<a href="http://www.ojs.uninus.ac.id">www.ojs.uninus.ac.id</a> Internet Source	<1 %
22	Hana Pradita. "Strategi Pengembangan Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta Sebagai Media Komunikasi Pendidikan", Al-Misbah (Jurnal Islamic Studies), 2018 Publication	<1 %
23	Submitted to Universitas Muhammadiyah Sukabumi Student Paper	<1 %
24	<a href="http://eprints.iainu-kebumen.ac.id">eprints.iainu-kebumen.ac.id</a> Internet Source	<1 %
25	<a href="http://scholarsmepub.com">scholarsmepub.com</a> Internet Source	<1 %
26	Submitted to Universitas Ibn Khaldun Student Paper	<1 %
27	<a href="http://issuu.com">issuu.com</a> Internet Source	<1 %
28	<a href="http://asihyulianda.blogspot.com">asihyulianda.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
29	<a href="http://www.journalfkipuniversitasbosowa.org">www.journalfkipuniversitasbosowa.org</a> Internet Source	<1 %

Submitted to Sriwijaya University

30

Student Paper

<1 %

---

31

[repository.upbatam.ac.id](http://repository.upbatam.ac.id)

Internet Source

<1 %

---

32

[siasat.fkip-umt.ac.id](http://siasat.fkip-umt.ac.id)

Internet Source

<1 %

---

33

[text-id.123dok.com](http://text-id.123dok.com)

Internet Source

<1 %

---

34

[zombiedoc.com](http://zombiedoc.com)

Internet Source

<1 %

---

35

[id.scribd.com](http://id.scribd.com)

Internet Source

<1 %

---

36

Submitted to Konsorsium Perguruan Tinggi Swasta Indonesia

Student Paper

<1 %

---

37

[core.ac.uk](http://core.ac.uk)

Internet Source

<1 %

---

38

[ejournal.unsrat.ac.id](http://ejournal.unsrat.ac.id)

Internet Source

<1 %

---

39

[eprints.pancabudi.ac.id](http://eprints.pancabudi.ac.id)

Internet Source

<1 %

---

40

[jurnal.untad.ac.id](http://jurnal.untad.ac.id)

Internet Source

<1 %

---

41

[repository.um-surabaya.ac.id](http://repository.um-surabaya.ac.id)

Internet Source

<1 %

42

eprints.uny.ac.id

Internet Source

<1 %

43

Romadlonia, Farhana. "Program Parenting Bagi Orang Tua Sebagai Strategi Dalam Membina Perilaku Keagamaan Peserta Didik (Studi Kasus di SDIT Nurul Iman Semarang)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

<1 %

44

Wildayana Wildayana, Machasin Machasin, Yulia Efni. "Pengaruh Pengawasan Dan Komunikasi Internal Terhadap Kepuasan Kerja Serta Dampaknya terhadap Kinerja Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Riau", Bahtera Inovasi, 2019

Publication

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off

# artikel elia

---

PAGE 1

---

PAGE 2

---

PAGE 3

---

PAGE 4

---

PAGE 5

---

PAGE 6

---

PAGE 7

---

PAGE 8

---

PAGE 9

---

PAGE 10

---